

Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Suryoto^{(1,a)*}, Anggara Setya Saputra^(1,b), Devit Bagus Indranika^(1,c), Ranjani^(1,d), dan Chamid Sutikno^(2,e)

⁽¹⁾Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 53152, Indonesia

⁽²⁾Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto, 53145, Indonesia

Email: ^(a)suryoto@unwiku.ac.id, ^(b)anggara@unwiku.ac.id, ^(c)devit@unwiku.ac.id,

^(d)ranjani@unwiku.ac.id, ^(e)c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

ABSTRAK

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki fungsi sebagai upaya menciptakan pembedayaan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa yang dimiliki agar mampu dimanfaatkan secara maksimal. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penguatan kelembagaan BUMDes agar mampu memaksimalkan fungsi- fungsi bisnis dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan BUMDes menjadi titik perhatian utama agar dapat mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama-sama oleh berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Makmur di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari masing masing pengurus dan memahami dari peran dan fungsi masing-masing lini serta meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan secara merata. Sebagai wujud adanya keberadaan BUMDes tentu prioritas dalam pencapaian ialah memberikan kontribusi bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa. Maka kehadiran pengabdian kepada masyarakat mengenai "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas" dianggap penting untuk dilaksanakan.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

The role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is one of the most important efforts in encouraging the strengthening of the community's economy. Village-Owned Enterprises (BUMDes) have a function as an effort to create community empowerment through managing the potential of the village so that it can be utilized optimally. The community empowerment program carried out in Susukan Village, Sumbang District, Banyumas Regency is an activity carried out to strengthen BUMDes institutions so that they are able to maximize business functions and community empowerment functions. The efforts made in the context of strengthening BUMDes institutions are the main focus in order to achieve a goal that is mutually agreed upon by the various parties involved in developing the management of BUMDes Mitra Usaha Makmur in Susukan Village, Sumbang Subdistrict, Banyumas Regency. Through institutional strengthening, it is expected to be able to improve the performance of each management and understand the roles and functions of each line as well as improve the community's economy in creating equitable prosperity. As a manifestation of the existence of BUMDes, of course the priority in achieving is to provide useful contributions to the community and village government. So the presence of community service regarding "Institutional Strengthening of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Susukan Village, Sumbang District, Banyumas Regency" is considered important to carry out.

Keywords: Social Welfare, Village Owned Enterprises (BUMDes)

Submit:

Revised:

Accepted:

Available online:

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



19.10.2022

25.10.2022

25.10.2022

17.11.2022

PENDAHULUAN

Sektor perekonomian masyarakat menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan dalam menjaga kestabilan ekonomi seiring dengan berjalannya sistem roda perekonomian di lingkungan masyarakat (Elisaveta dan Thomas. 2019). Kemajuan perekonomian Indonesia dapat diwujudkan dengan adanya sistem perubahan yang mampu menggerakkan kapasitas sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang dimiliki sebagai bahan dan dasar untuk memulai suatu perubahan (Geuss, R. 2017). Hal ini menjadikan kemampuan sumber daya manusia sebagai modal utama yang memiliki kapasitas untuk dapat mengelola segala sesuatu yang dapat dikelolanya (Heskia dan Amba. 2011). Dengan hal tersebut, kesadaran dan kepedulian dalam membangun kemandirian ekonomi desa dapat dibentuk dan dibangun secara bersama-sama yang secara umum dapat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat maupun pemerintah desa secara khusus (Promberger and Iris Rauskala, 2003).

Pemerintah desa menjadi salah satu pihak yang memiliki peran strategis di suatu wilayah yang dapat melakukan berbagai langkah yang dirancang secara mandiri dan bebas yang ditujukan dalam pengembangan dan pembangunan suatu desa (Tansu Demir. 2018), hal ini seiring dengan adanya Undang-Undang mengenai Desa yang menjelaskan bahwa desa memiliki keleluasaan secara khusus dalam mengatur, mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi desa yang dimiliki agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian desa maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan dalam memanfaatkan sumber potensial desa ialah mendirikan dan membentuk program lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kurt dan Iris. 2003). Pembentukan BUMDes tidak serta merta dibentuk secara tersendiri ataupun bebas, namun dengan landasan yang jelas melalui suatu kebijakan ataupun peraturan yang berlaku. Salah satunya sejalan dengan harapan pembangunan daerah melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) yang berbasis pada pembangunan dipedesaan. Pembangunan pedesaan ini memiliki skala prioritas pembangunan yang mencakup ruang lingkup yang meliputi: (a). Optimalisasi terhadap manajemen kelembagaan, (b). Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, (c). Peningkatan model usaha yang kreatif (d). Pengembangan pada sarana dan fasilitas (Michael. 2016). Dengan hal tersebut, melalui adanya program pembangunan pedesaan ini mampu mendorong perekonomian agar dapat bergerak secara cepat di desa dan lingkungan masyarakat salah satunya yaitu dengan melakukan pembentukan/pendirian BUMDes (Miftah Toha. 2012).

Lembaga BUMDes merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dominan berbasis pada sektor ekonomi masyarakat desa yang dijadikan sebagai bentuk kebijakan dan salah satu pendekatan strategis untuk membantu mewujudkan harapan kestabilan dinamika pada sektor perekonomian desa. Secara umum pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tergolong dalam aktivitas sektor ekonomi pedesaan yang dijadikan sebagai landasan dan dasar dalam melaksanakan dua fungsi strategis diantaranya sebagai termasuk dalam kegiatan ekonomi pedesaan sebagai dasar pelaksanaan dalam menjalankan dua fungsi strategis meliputi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Lembaga BUMDes sebagai lembaga sosial yang dilaksanakan secara merata dan adil bagi masyarakat dalam hal ini ialah penyediaan layanan untuk masyarakat sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial menjadikan lembaga bisnis yang memprioritaskan pada keuntungan yang ditujukan untuk mendukung dan mendorong peningkatan terhadap pendapatan desa (Lim J Yung, 2017). Kebijakan mengenai BUMDes memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa yang menjelaskan bahwasanya lembaga BUMDes sebagai salahsatu lembaga usaha yang terdapat di desa yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Desa Susukan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2015 Desa Susukan telah mendirikan dan membentuk suatu lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dengan nama "BUMDes Mitra Usaha Makmur". Tujuan awal dari dibentuknya BUMDes ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor ekonomi masyarakat melalui memanfaatkan potensi-potensi ataupun aset desa yang dimiliki untuk membangun dan mengembangkan sektor perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Awalnya Unit usaha BUMDes Mitra Usaha Makmur hanya mengelola Taman Lazuardi yang luas tanahnya mencapai 4000 M² yang digunakan sebagai taman

edukasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti wahana Gazebo, Perpustakaan Sederhana dan ruang edukasi masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara masif terus dilakukan, namun pengembangan unit usaha masih belum maksimal. Hal ini didasari dengan lemahnya manajemen kelembagaan pada BUMDes yang dilakukan oleh para pengurus sampai dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini terjadi karena masih belum optimalnya pengurus BUMDes dalam menjalankan peran dan fungsi dari masing-masing lini dalam kelembagaan BUMDes yang dibentuk secara bersama.

Pengembangan yang terkesan lambat seperti ini, tentu menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian dan menjadi tolak ukur keberhasilan BUMDes. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat pengelolaan BUMDes semakin terus berkembang. Pergerakan pengembangan yang minim membuat BUMDes semakin tertinggal dan sulit bersaing dengan kompetitor yang lain dalam mencapai suatu tujuan yang secara luas. Dengan hal tersebut, diperlukannya penguatan terhadap manajemen kelembagaan BUMDes dalam menopang pergerakan-pergerakan secara masif untuk menciptakan gagasan ataupun ide inovasi dan kreatif dalam pengembangan pengelolaan BUMDes yang dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat dan pemerintah desa. Secara umum masalah yang dihadapi saat ini oleh BUMDes Mitra Usaha Makmur antara lain para pengurus BUMDes belum bisa sepenuhnya memahami fungsi dan perannya dalam manajemen kelembagaan BUMDes, tidak dapat menemukan dan menggali segala bentuk potensi yang dijadikan bentuk usaha, dan pengawasan terhadap pengurus BUMDes minim dilakukan. Melihat fenomena dari banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Susukan, namun tidak diimbangi dengan tata kelola manajemen kelembagaan dalam BUMDes Mitra Usaha Makmur. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran dari pengabdian kepada pengurus BUMDes Mitra Usaha Makmur dan masyarakat mengenai “Penguatan Manajemen Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas” dianggap penting untuk dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan tempat

Waktu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022. Tempat lokasi dilaksanakannya pengabdian di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Prosedur pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) atau juga dapat disebut metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. Dalam FGD, sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. FGD merupakan metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan di dalam penelitian pemasaran, dalam perkembangannya kemudian pemakaian FGD dengan cepat meluas pemanfaatannya di dalam ilmu-ilmu sosial (Susan Tsui Grundmann, et.al. 2013). Manfaat yang diperoleh dari FGD adalah bahwa dalam waktu relatif singkat (cepat) dapat digali mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah dan harapan perubahan berkaitan dengan masalah tertentu. Pelaksanaan FGD secara umum dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut ini:



Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan

1. **Persiapan**

Tim fasilitator memulai komunikasi secara informal dengan peserta yang berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan. Ruang yang memadai sangat menentukan kelancaran diskusi, maka diperlukan ruang yang nyaman

2. **Pembukaan**

Fasilitator berfungsi sebagai pemandu diskusi yang memulai dengan melakukan pemanasan dan penjelasan tentang beberapa hal, seperti: sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan pengenalan

3. **Pelaksanaan**

Selanjutnya proses diskusi diserahkan kepada seluruh peserta dengan hak suara yang sama. Peran fasilitator hanya mendampingi diskusi agar tidak keluar dari jalurnya. Dalam hal ini peran notulen sangat penting dalam merangkum jalannya diskusi

4. **Penutup**

Fasilitator menyampaikan kesimpulan secara umum dari seluruh rangkaian diskusi. Berkenaan dengan hal itu apabila masih ada pertanyaan atau usulan tambahan, maka fasilitator perlu mendiskusikannya kembali dengan seluruh peserta tentang mekanisme pembahasan lanjutannya, sehingga benar-benar diperoleh kesepakatan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

BUMDes Desa Susukan adalah salah satu bentuk kelembagaan yang dominan berbasis pada sektor ekonomi masyarakat di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang telah berjalan cukup lama. Pada tahun 2015 Desa Susukan telah mendirikan dan membentuk suatu lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dengan nama "BUMDes Mitra Usaha Makmur". Tujuan awal dari dibentuknya BUMDes ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor ekonomi masyarakat melalui memanfaatkan potensi-potensi ataupun aset desa yang dimiliki untuk membangun dan mengembangkan sektor perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Awalnya Unit usaha BUMDes Mitra Usaha Makmur hanya mengelola Taman Lazuardi yang luas tanahnya mencapai 4000 M² yang digunakan sebagai taman edukasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti wahana Gazebo, Perpustakaan Sederhana dan ruang edukasi masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara masif terus dilakukan, namun pengembangan unit usaha masih belum maksimal. Hal ini didasari dengan lemahnya manajemen kelembagaan pada BUMDes yang dilakukan oleh para pengurus sampai dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini terjadi karena masih belum optimalnya pengurus BUMDes dalam menjalankan peran dan fungsi dari masing-masing lini dalam kelembagaan BUMDes yang dibentuk secara bersama. Berikut dapat ditunjukkan beberapa gambar yang mendukung.



Gambar 2. Taman Edukasi di Taman Lazuardi 2022



Gambar 3. Taman Edukasi di Taman Lazuardi 2022



Gambar 4. Fasilitas Umum Toilet dan Mushola Taman Lazuardi 2022



Gambar 5. Kolam Renang dan Ruang Bilas Taman Lazuardi 2022



Gambar 6. Spanduk Depan Taman Lazuardi 2022

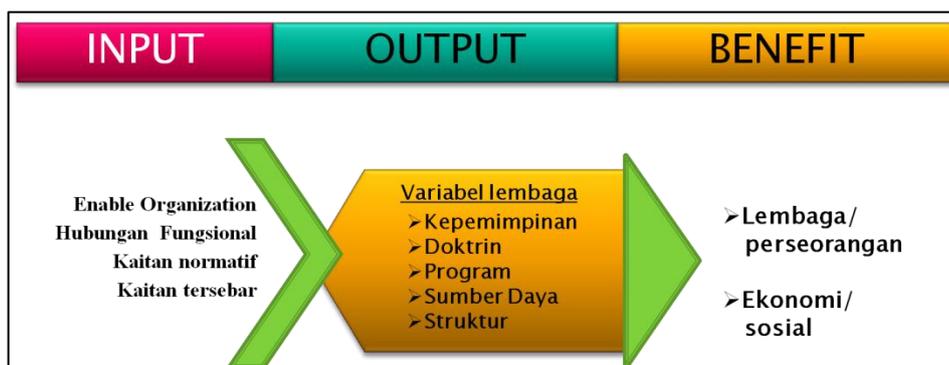


Gambar 7. Cafe Taman Lazuardi 2022

Pengembangan yang terkesan lambat seperti ini, tentu menjadi salah satu permasalahan yang menjadi satu titik perhatian dan menjadi tolak ukur keberhasilan BUMDes (Hallvard Moe. 2010). Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat pengelolaan BUMDes semakin terus berkembang. Pergerakan pengembangan yang terbilang minim membuat BUMDes semakin tertinggal dan sulit bersaing dengan kompetitor yang lain dalam mencapai suatu tujuan yang secara luas. Dengan hal tersebut, diperlukannya penguatan terhadap manajemen kelembagaan BUMDes dalam menopang pergerakan-pergerakan secara masif untuk menciptakan gagasan ataupun ide inovasi dan kreatif dalam pengembangan pengelolaan BUMDes yang dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat dan pemerintah desa. Meskipun demikian dalam pengelolaannya, BUMDes Mitra Usaha Makmur terus berupaya menerapkan tata kelola usaha sebaik mungkin namun secara umum belum maksimal dilakukan. Hal ini dibuktikan dari adanya struktur kepengurusan BUMDes Mitra Usaha Makmur yang terdiri dari direktur, tim pelaksana teknis, dan tim administrasi. Kesederhanaan struktur pengurus adalah sebanding dengan kesederhanaan tata kelolanya. Direktur dalam memimpin BUMDes Mitra Usaha Makmur ini membagi segala urusan menjadi dua macam, yakni urusan teknis dan urusan administratif. Urusan teknis meliputi urusan produksi dan urusan pemasaran. Sedangkan urusan administratif adalah meliputi urusan pengelolaan SDM dan keuangan.

BUMDes Mitra Usaha Makmur sampai saat ini baru mampu menjalankan beberapa usaha seperti simpan pinjam dan pengelolaan air bersih. Pengelolaan program kerja tersebut belum bisa mendapatkan hasil keuntungan yang maksimal dan merata sehingga belum bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa.

Pelaksanaan Focus Group Discussion.



Gambar 8. Pelaksanaan Focus Group Discussion.

PEMBAHASAN

Forum diskusi yang dilaksanakan melibatkan berbagai elemen yang ada dimasyarakat Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sistem maupun teknik dalam Diskusi *Focus Group Discussion (FGD)*. Melalui teknik ini setiap kelompok dalam forum diskusi dapat menggali dan memetakan terhadap potensi-potensi yang terdapat dari setiap unsur (Toha, 2012). Secara umum masyarakat Desa Susukan memiliki sumber daya yang cukup potensial dimanfaatkan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah potensi dari keberagaman unsur masyarakat desa. Unsur-unsur masyarakat Desa Susukan tersebut, diantaranya unsur pemerintah, unsur organisasi masyarakat, unsur pengusaha, unsur lembaga Pendidikan, serta unsur masyarakat biasa. Permasalahan umum yang terjadi dalam BUMDes Mitra Usaha Makmur adalah para pengurus belum bisa memahami terhadap peran dan fungsi BUMDes dimasyarakat dan pemerintah desa, masih minim pengembangan unit usaha terhadap sumber potensial yang ada dan pengawasan terhadap kinerja pengurus BUMDes tidak maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan peran dari kegiatan FGD dalam mengupayakan manajemen kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur menjadi lebih sesuai dengan keberadaan BUMDes dimasyarakat. Melalui kegiatan FGD diharapkan Masyarakat mampu memahami status/ posisinya masing-masing dalam kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur, serta mampu memahami bentuk peran maupun fungsi yang dapat dilakukan yang sebagai bentuk mewujudkan tujuan yang disepakati bersama dan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan BUMDes. Berikut dokumentasi kegiatan FGD:

1. *Enable Organization*

Substansi dari potensi *enable organization* adalah suatu bentuk pengakuan ataupun perjanjian yang bertujuan untuk mempermudah lembaga dalam bergerak melakukan segala aktivitasnya (Stephanie. 2010). Dalam hal ini ialah masyarakat Desa Susukan terhadap pengelolaan BUMDes yang belum memahami peran ataupun fungsi dalam kelembagaan BUMDes. Para pengurus masih belum bisa menjalankan segala aktivitas dalam pengembangan BUMDes sehingga dalam menggali ataupun memetakan sumber potensial belum sepenuhnya tercipta sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh desa.

Dengan kondisi seperti ini, *enable organization* terhadap upaya pembentukan kelembagaan (Moeljanto, 2010). Pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Makmur harus melibatkan oleh tiga pihak, yaitu Pemerintah desa, masyarakat umum dan pengurus BUMDes. Secara umum melalui ketiga pihak tersebut sangat membantu dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembentukan kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur di Desa Susukan. Keleluasaan khusus kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat dimanfaatkan dalam mengatur, mengelola dan mengarahkan masyarakat dalam melakukan perencanaan desain kelembagaan yang akan diterapkan dalam struktur kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur. Begitu juga dengan peran masyarakat umum untuk mendukung dan mendorong segala aktivitas pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Makmur sebagai bentuk wujud rasa partisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan utama pengelolaan BUMDes yang dapat berkontribusi secara penuh bagi masyarakat maupun pemerintah desa kedepannya

2. Hubungan Fungsional

Kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur yang dibentuk secara bersama oleh pemerintah desa, masyarakat umum dan para pengurus BUMDes yang tentunya sangat membutuhkan berbagai pengarahan dan pendampingan dari berbagai pihak. Dengan pengarahan dan pendampingan yang diberikan, kelembagaan BUMDes diharapkan mampu lebih mudah bergerak dan menjalankan fungsi maupun peran BUMDes untuk mencapai tujuan lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan adanya keberadaan BUMDes Mitra Usaha Makmur secara fakta masih membutuhkan pengarahan dan pendampingan untuk memperbaiki kinerja pengurus dalam menjalankan peran, fungsi dan tata kelolanya dalam manajemen kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur.

Berkaitan dengan hubungan fungsional dalam manajemen kelembagaan BUMDes ini, memiliki hubungan terhadap beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes seperti lembaga pendidikan dan pelatihan yang merupakan salah satu sekian banyak organisasi yang paling tepat. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut memiliki dasar sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan. Desa Susukan merupakan salah satu desa di kecamatan Sumbang dimana unsur masyarakatnya sangat beragam dalam menimba ilmu dan pengetahuan di lembaga pendidikan. Melalui lembaga tersebut menjadi modal dasar dalam memulai dan membantu peningkatan manajemen kelembagaan terhadap pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Makmur menjadi lebih produktif dan berkontribusi aktif di masyarakat dan pemerintah desa.

3. Kaitan Normatif

Pengembangan manajemen kelembagaan dalam BUMDes Mitra Usaha Makmur diperlukan banyak waktu yang tidak dapat dilakukan secara instan. Hal ini, para pihak yang terlibat dalam Pengelola BUMDes mampu memiliki gagasan maupun ide inovasi dan kreatif supaya dapat menjalankan fungsi dan peran manajemen kelembagaan dalam BUMDes dan kedepannya mampu berhadapan dengan para kompetitor. Namun secara umum kondisi yang terjadi saat ini didalam kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur belum bisa menjadi aktor yang dapat memanfaatkan peran dan fungsi dalam BUMDes sehingga untuk bersaing dengan kompetitor lain sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Berkenaan dengan kondisi tersebut walaupun pendirian BUMDes Mitra Usaha Makmur tahun 2015 namun dari berbagai pihak yang terlibat dalam BUMDes ternyata masih belum berpengalaman dan belum mengerti tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Sehingga diperlukan pihak-pihak yang mampu menjembatani penyelesaian permasalahan tersebut (Komalasari, dkk, 2019).. Dalam hal ini setiap unsur lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan desa yang berpeluang untuk mengambil peran hubungan fungsional. Pemerintah daerah menjadi salah satu yang memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan manajemen kelembagaan dalam BUMDes Mitra Usaha Makmur.

KESIMPULAN

Dalam pengembangan manajemen kelembagaan BUMDes menjadi salah satu dasar yang harus diperbaiki dan dikuatkan secara mendalam dengan melibatkan berbagai aktor maupun pihak. Penguatan manajemen kelembagaan BUMDes menjadi sangat penting dan perhatian utama dalam lingkup masyarakat desa. Upaya yang dilakukan dalam penguatan kelembagaan ini menjadi salah satu bentuk langkah alternatif untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh pengurus BUMDes sesuai dengan alur fungsi dan peranannya masing-masing lini agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalangan level bawah. Selain itu dengan adanya penguatan manajemen kelembagaan BUMDes Mitra Usaha Makmur ini dapat membuka peluang usaha baru dan dapat mengurangi pengangguran ditingkat desa. Sehingga dengan adanya BUMDes Mitra Usaha Makmur menjadi wadah utama masyarakat Desa Susukan untuk memperbaiki kondisi sektor perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa. Sehingga sangat penting disini, peran strategis yang dimiliki oleh berbagai pihak yang berkecimbung dalam pengelolaan BUMDes seperti pemerintah desa, pihak akademisi, dan pemerintah daerah untuk

bersama-sama sinergi dalam mengembangkan BUMDes Mitra Usaha Makmur dapat mencapai tujuan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

REFERENSI

- Elisaveta Gjorgji Sardzoka and Thomas Li-Ping Tang. (2019). *Differences Between the Private and the Public Sectors*. Hal journal of Business Ethics DOI 10.1007/s10551-008-9955-1. Hal 4
- Geuss, R. (2017). *Public goods. Private goods. Princeton and Woodstock*: Princeton University Press. Hal 5.
- Heskia Charles dan Ambar. (2011). *Strategi dan Struktur Birokrasi Menuju Good Governance*. Gava Media. Yogyakarta. Hal 47-50.
- Hallvard Moe. (2010). *Defining public service beyond broadcasting: the legitimacy of different approaches*. International Journal of Cultural Policy, 1–17, First Article. University of Bergen. Hal 3.
- Kurt Promberger and Iris Rauskala. (2003). *New Public Management-An Introduction from the UK Perspective*. Working Paper 6. Hal 1
- Michael D. Siciliano. (2016). *Ignoring the Experts: Networks and Organizational Learning in the Public Sector, J Public Adm Res Theory (2016) doi: 10.1093/jopart/muw052* First published online: September 6, 2016. Published by Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory, Inc. hal 5.
- Miftah Toha. (2012). *Perilaku organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 12-13.
- Moeljanto, T. (2010). *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puput Tri Komalasari, dkk. (2019). *Pengaruh Public Service Motivatioon Dan Organizational Citizenship Behavior Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan*, Vol 2 No 2.
- Stephanie Moulton and Chaeles Wise. (2010). *Shifting Boundaries between the public and private sectors: Implication Fromt the Economic Crisis*. Public Administration Review May/June 2010, 70,3, social science Database, Pg 349. Hal 3.
- Susan Tsui Grundmann, et.al. (2013). *Perspectives on Organization Workplaces*. A Report to the President and the Congress of the United States by the U.S. Merit Systems Protection Board. Washington DC 20419-0001.
- Tansu Demir. (2018). *Administration and Organization Practice*. Intl Journal of Public Administration, 31: 574–591, Department of Public Administration, University of Illinois at Springfield, Illinois, USA
- Yung, (2017). *Village Entre Prise And Management*. Junal Management And Developmment.